

# Peran Mubalig Pedagang dalam Islamisasi di Indonesia

Siti Fauziah

(Dosen Fak. Tarbiyah dan Adab IAIN SMH Banten)

## Abstrak :

*Secara garis besar poses penyebaran Islam dapat melalui berbagai saluran seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan (pesantren), tasawuf, kesenian, politik, dan lain-lain. Semuanya saling berkaitan satu sama lain yang mempengaruhi prose konversi dan Islamisasi masyarakat Indonesia dari semenjak Islam hanya sebagai agama yang dianut oleh sekelompok kecil orang sampai menjadi kekuasaan politik.*

*Hubungan daerah-daerah di Indonesia memiliki hubungan sejarah yang panjang, yang dapat dilacak sampai ke masa yang sangat tua (antiquity). Kontak paling awal antara kedua wilayah ini, khususnya berkaitan dengan perdagangan, bermula bahkan sejak masa Punisia dan Saba. Oleh karena itu perdagangan dianggap menjadi saluran yang memiliki peran penting dalam proses Islamisasi yang dibawa oleh para pedagang Arab yang datang ke Indonesia.*

*Peran mubalig pedagang menjadi penting bukan hanya pada awal penyebaran Islam, tetapi juga ketika terjadinya peningkatan arus kegiatan ekonomi yang ditandai dengan tumbuhnya kota emporium (pusat dagang) dan entrepot (tempat menimbun barang di bawah penguasaan duane) yang diikuti kelahiran kerajaan Islam di bawah kesultanan di sepanjang pantai kepulauan.*

*Para mubalig pedagang selain berjasa dalam menyebarkan agama Islam, mereka juga berperan besar dalam penyebaran kebudayaan Islam ke berbagai wilayah di Indonesia sehingga muncul gaya hidup yang cosmopolitan, dinamis dan egaliter.*

**Kata kunci :** *mubalig pedagang, Islamisasi, Indonesia*

## **Pendahuluan**

Pada taraf permulaan, di antara saluran Islamisasi yang pernah berkembang di Indonesia adalah perdagangan. Hal itu sejalan dengan kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 hingga abad ke-16. Pada saat itu pedagang-pedagang Muslim (Arab, Persia, India) turut serta ambil bagian dalam perdagangan dengan pedagang-pedagang dari negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Penggunaan perdagangan sebagai saluran Islamisasi sangat menguntungkan karena bagi kaum Muslim tidak ada pemisahan antara kegiatan berdagang dan kewajiban menyampaikan ajaran Islam kepada pihak-pihak lain. Kecuali itu, pola perdagangan pada abad-abad sebelum dan ketika Islam datang sangat menguntungkan, karena golongan raja dan bangsawan umumnya turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham.<sup>1</sup>

Apabila pembawa Islam ke Indonesia pada masa permulaan itu adalah golongan pedagang, maka jelaslah bahwa yang menjadi pendorong utama untuk berkunjung ke Indonesia adalah faktor ekonomi perdagangan. Hal itu adalah sesuai pula dengan masa perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antara negeri-negeri di bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia. Sejak Samudra Pasai dan Malaka menjadi pusat kerajaan Islam dan hubungannya sudah banyak dengan daerah-daerah lain di Indonesia, maka orang-orang Indonesia dari pusat-pusat Islam itu sendiri yang menjadi pembawa dan penyebar agama Islam ke daerah-daerah di kepulauan Indonesia.<sup>2</sup>

Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan dipercepat oleh situasi dan kondisi politik beberapa kerajaan di mana adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan.

Tulisan ini berusaha memaparkan tentang pentingnya perdagangan sebagai saluran penyebaran Islam di Indonesia, terutama lagi peran para mubalig pedagang dalam proses penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia.

## **Perdagangan Bangsa Arab**

Jalur pelayaran kuno dan perdagangan yang menghubungkan antara daerah semenanjung Arabia, Persia, India, Cina dan Nusantara telah dikenal lama. Di Asia terdapat dua jalan perniagaan besar, yaitu jalan

darat dan jalan laut. Jalan darat yang sering disebut Jalan Sutera, dari Cina melalui Asia Tengah dan Turkestan hingga ke Laut Tengah. Jalan darat yang berhubungan juga dengan jalan-jalan kafilah dan India ini merupakan jalan yang tertua.<sup>3</sup>

Jalan laut yang dimulai dari Cina melalui selat Malaka dan Nusantara (Indonesia) ke India, baru dikenal sejak abad ke-1 M, pelayaran antara Cina dan India waktu itu sudah berjalan dengan baik. Menurut Manguin kapal-kapal yang menghubungkan India dan Cina adalah kapal-kapal Nusantara dan India. O.W.Wolters berpendapat bahwa hubungan dagang antara Cina dan Nusantara telah ada walaupun masih terbatas. Perdagangan bangsa Arab telah berlangsung jauh sebelum agama Islam lahir pada abad ke-7. Mereka menguasai jalur pelayaran kuno dan perdagangan yang menghubungkan antara daerah semenanjung Arabia, Persia, India, Cina, dan Nusantara telah dikenal sejak lama.<sup>4</sup>

Jauh sebelum memeluk Islam, para pedagang Arab Selatan di bawah pemerintahan raja-raja Saba dan Himyar telah banyak yang bertempat tinggal di India selatan, Srilanka, dan Nusantara. Mereka aktif dalam jalur perdagangan yang menghubungkan Cina dengan kerajaan Romawi melalui lautan.<sup>5</sup>

Sekitar tahun 1200-600 SM telah berkembang kerajaan Mina di Yaman Selatan. Kerajaan ini kemudian digantikan oleh kerajaan Saba yang berkuasa antara 950-650 SM. Setelah runtuhnya kerajaan Saba lama, maka muncul kerajaan yang juga bernama Saba, berkuasa 650-115 SM. Kerajaan tersebut dikenal mempunyai peradaban yang tinggi. Tiga dinasti tersebut menguasai jalur pelayaran dagang di lautan India sampai Nusantara. Perdagangan antara Arab Selatan dan Nusantara tidak melalui India diketahui dari penemuan manik-manik di Kalimantan yang berasal dari masa pendudukan Romawi di Mesir yang menjadi komoditi penting yang didatangkan dari lautan tengah melalui Arab Selatan.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya kekuasaan raja-raja Saba itu akhirnya digantikan oleh raja keturunan Himyar. Arab selatan mengalami masa kejayaannya lagi pada abad ke-2 – 7 M, berdasarkan berita penulis klasik Yunani-Romawi. Kitab *Periplous tes Erythras Thalasses*, berisi tentang jalur pelayaran perdagangan antara laut merah sekitar pelabuhan Aden di Arab Selatan dengan Nusantara yang disebut Chryse atau pulau Mas (*The Golden Chernoses*).

Menurut Gustave Le Bon, seorang ahli sejarah Prancis, Eropa

dan India sejak abad-abad terdahulu telah mengadakan pertukaran barang-barang dagangan, tetapi dengan cara tidak langsung. Kedua negeri itu, meskipun telah mengadakan hubungan dagang, tidak saling mengenal. Hubungan itu berlangsung melalui laut Tengah, melewati negeri Tartar dan Persia, atau melalui Mesir dengan melewati Laut merah, selat Persia, dan pesisir-pesisir Laut Arabia. Bangsa Arab pada masa itu adalah satu-satunya perantara dalam hubungan dagang tersebut. Penduduk Yaman yang dulu dikenal dengan nama orang-orang Saba memegang monopoli atas barang-barang dagangan dari India. Pedagang-pedagang Mesir setelah 150 tahun meninggalnya Iskandar, mendapat barang-barang India dengan perantaraan orang-orang Arab.<sup>8</sup>

Mesir menjadi daerah Romawi pada 30 tahun sebelum Masehi. Agustus berkeyakinan, seperti juga keyakinan orang-orang di masa itu, bahwa negeri Arab, adalah sumber rempah-rempah dan wangi-wangian. Padahal orang-orang Arab mendatangkan bahan-bahan tersebut dari India. Berdasarkan keyakinan itu Agustus melancarkan serangannya ke negeri arab. Tetapi dia tidak memperoleh kemenangan yang dibutuhkannya. Hubungan bangsa Arab dengan India kemudian menurun di waktu kemunduran kerajaan Romawi, dan putus sama sekali tatkala khalifah-khalifah yang menggantikan Nabi Muhammad saw berkuasa. Hubungan ini tetap terputus dengan dunia Nasrani selama lebih dari seribu tahun.<sup>9</sup>

Bangsa Arab dahulu adalah kaum pelancong terkemuka. Mereka tidak gentar dengan jauhnya jarak yang akan mereka tempuh. Bangsa Arab sejak tahun-tahun pertama berdirinya kerajaan telah mempunyai hubungan dagang dengan negeri-negeri yang oleh bangsa-bangsa Eropa disangsikan keberadaannya, seperti Cina, sebagian dari Rusia, pedalaman Afrika, dan lain-lainnya. Pelancong-pelancong bangsa Arab yang pertama-tama terdiri dari pedagang-pedagang yang berkeliling untuk berniaga. Walaupun mereka tidak mempunyai persiapan-persiapan yang serba lengkap untuk penyelidikan secara ilmiah, namun kunjungan-kunjungan perniagaan mereka tetap mengandung keajaiban-keajaiban yang berguna. Di antaranya dapat disebutkan kunjungan pedagang Sulaiman ke Cina pada abad ke-9 Masehi. Pedagang ini berlayar dari pelabuhan Siraf yang terletak di Teluk Persia, dimana terdapat banyak juga kapal Cina.<sup>10</sup>

### **Proses Penyebaran Islam**

Antara kedatangan Islam, terbentuknya masyarakat muslim, lebih-lebih

munculnya kerajaan-kerajaan Muslim mengambil proses waktu yang berabad-abad. Demikian pula proses tersebut melalui bermacam-macam saluran yang tentunya menguntungkan kedua belah pihak, yaitu baik bagi orang Islam sendiri maupun bagi masyarakat yang menerima Islam itu sendiri. Secara garis besar poses penyebaran Islam dapat melalui berbagai saluran seperti perdagangan, perkawinan, birokrasi pemerintahan, pendidikan (pesantren), tasawuf, kesenian, politik, dan lain-lain.<sup>11</sup>

Diantara saluran-saluran Islamisasi tersebut yang dianggap memiliki peran penting dalam mengenalkan dan menyebarkan ajaran Islam yang paling awal adalah saluran perdagangan. Kebanyakan sarjana Barat memegang teori bahwa para penyebar pertama Islam di Nusantara adalah para pedagang Muslim yang menyebarkan Islam sembari melakukan perdagangan di wilayah ini, maka *nucleus* komunitas muslim pun tercipta, yang pada gilirannya memainkan andil besar dalam penyebaran Islam. Sebagian para pedagang itu melakukan perkawinan dengan keluarga bangsawan lokal sehingga memungkinkan mereka atau keturunan mereka pada akhirnya mencapai kekuasaan politik yang dapat digunakan untuk penyebaran Islam.<sup>12</sup>

Dalam kerangka ini, van Leur percaya bahwa motif ekonomi dan politik sangat penting dalam masuk Islamnya penduduk Nusantara. Dalam pendapatnya, para penguasa pribumi yang ingin meningkatkan kegiatan-kegiatan perdagangan di wilayah kekuasaan mereka menerima Islam. Dengan begitu mereka mendapatkan dukungan para pedagang Muslim yang menguasai sumber-sumber ekonomi. Sebaliknya para penguasa memberi perlindungan dan konsesi-konsesi dagang kepada para pedagang Muslim. Dengan konversi mereka kepada Islam, para penguasa pribumi Nusantara dapat berpartisipasi secara lebih ekstensif dan menguntungkan dalam perdagangan internasional yang mencakup wilayah sejak dari laut Merah ke laut Cina. Lebih jauh, dengan masuk Islam dan mendapat dukungan para pedagang Muslim para penguasa itu dapat mengabsahkan dan memperkuat kekuasaan mereka, sehingga mampu menangkis jaring-jaring kekuasaan Majapahit.<sup>13</sup>

### **Pertumbuhan Komunitas Muslim**

Terjadinya Islamisasi penduduk Arab selatan sejak abad ke-7 menunjukkan bahwa penyebaran agama Islam menjadi salah satu untuk lebih mengembangkan perdagangan. Melalui jalur perdagangan yang sudah dikenal sebelumnya. J.C.Van Leur

mengemukakan bahwa daerah sebelah timur Mesir dan Mesopotamia yang membentang meliputi wilayah yang luas sehingga perdagangan laut itu tetap dipertahankan. Pelayaran itu menghubungkan pelabuhan-pelabuhan sepanjang pantai Samudra India dengan komoditi penting yang didistribusikan ke berbagai kawasan di Asia Tenggara dan Nusantara. Para pedagang Muslim dari Arab selatan telah banyak menetap di Cina, dan pada abad ke-9 mereka membentuk komunitas Muslim di beberapa kota pelabuhan penting di Cina selatan, Campa dan pantai utara Jawa.<sup>14</sup>

Menurut Arnold, para pedagang Arab menyebarkan Islam ketika mereka dominan dalam perdagangan Barat-Timur sejak awal abad ke-7 dan ke-8 M. Meski tidak terdapat catatan-catatan sejarah tentang kegiatan mereka dalam penyebaran Islam, cukup pantas mengasumsikan bahwa mereka terlibat pula dalam penyebaran Islam kepada penduduk lokal di Nusantara. Asumsi ini menjadi lebih mungkin kalau orang, misalnya mempertimbangkan fakta yang disebutkan sumber-sumber Cina, bahwa menjelang akhir perempatan ketiga abad ke-7 seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah pemukiman Arab Muslim di pesisir pantai Sumatra. Sebagian orang-orang Arab ini dilaporkan melakukan perkawinan dengan wanita lokal sehingga membentuk *nucleus* sebuah komunitas Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab pendatang dan penduduk lokal. Menurut Arnold, anggota-anggota komunitas Muslim ini juga melakukan kegiatan-kegiatan penyebaran Islam.<sup>15</sup>

Sulaiaman as-Sirafi, pedagang dari pelabuhan Siraf di Teluk Persia yang mengunjungi Timur Jauh mengatakan bahwa di Sala (Sulawesi) terdapat orang-orang Islam pada waktu itu, yaitu kira-kira pada akhir abad ke-2 Hijriyah. Hal ini dapat dipastikan dan tidak perlu dijelaskan lagi, karena perdagangan rempah-rempah dan wangi-wangian yang terdapat di Maluku sangat menarik pedagang-pedagang Muslim untuk berkunjung ke Maluku dan tempat-tempat yang berdekatan dengannya. Menurut pengarang *Nukhbatuddahr*, kepulauan Sila dekat Sulawesi dan pulau-pulau yang berdekatan dengannya biasanya disebut laut Sala.<sup>16</sup>

Pemukiman Arab muslim di Cina dan Campa telah tumbuh sejak abad ke-8 – 9. Jadi tidak mustahil jika pada akhir abad ke-11 telah terdapat komunitas Muslim, seperti dibuktikan dengan adanya makam Islam dan keramik Cina di situs Leran. Temuan tersebut dapat menunjukkan bahwa sejak abad ke-11 daerah Leran dan sekitarnya merupakan pusat perdagangan penting di Jawa Timur.<sup>17</sup>

Apabila pada waktu kedatangan pertama-tama kedatangan mereka ke setiap daerah bertujuan dagang, maka pada tahap berikutnya secara tidak langsung dapat pula sambil menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Para pedagang Muslim itu apabila datang di suatu tempat perdagangan mereka mungkin tidak segera kembali ke tempat asal mereka. Mungkin menunggu barang dagangannya habis dan untuk kembali membawa hasil bumi atau produksi setempat, ditambah menunggu waktu pelayaran kembali yang tergantung pada musim, maka terpaksa mereka harus tinggal beberapa bulan.<sup>18</sup>

Pedagang-pedagang muslim itu lambat laun berkumpul dalam suatu perkampungan tersendiri. Perkampungan semacam itu sering disebut *Pakojan* yang berarti perkampungan kaum muslim yang berasal dari Persia, India, Arab seperti terdapat pada bekas-bekas kota-kota Muslim di Banten, Jakarta, dan lain-lainnya. Lambat laun terjadi hubungan antara kelompok-kelompok mereka dengan masyarakat Indonesia setempat. Dengan demikian akan terjadilah proses Islamisasi, lebih-lebih jika di antara penduduk setempat terjadi perkawinan sehingga terbentuklah keluarga Muslim yang makin lama makin lebih besar menjadi masyarakat Muslim.<sup>19</sup>

### **Bandar Perdagangan dan Penyebaran Islam**

Sebagai wilayah kepulauan, yang lautannya lebih luas daripada daratannya. Indonesia mempunyai letak strategis dan potensial bagi pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan. Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan tersebut antara lain didorong faktor lautan yang menjadi jalur pelayaran antar pulau dan juga jalur pelayaran internasional. Dengan jalur pelayaran tersebut, terjadilah jaringan perdagangan antar pulau dan antar suku bangsa yang kemudian berkembang menjadi jaringan perdagangan internasional atau perdagangan antar bangsa.<sup>20</sup>

Berdasarkan sumber-sumber sejarah, baik berupa Tionghoa, Arab, Persia, dan negeri-negeri lain di Timur Tengah, juga bukti berupa nisan-nisan kubur, ternyata sejak abad ke-7 atau 8 M dan abad-abad selanjutnya, para pedagang Muslim sudah berperan dalam jaringan perdagangan internasional melalui Selat Malaka.<sup>21</sup>

Dengan adanya jalur pelayaran sejak masa awal itu, terjadilah jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat kesultanan dengan kota-kota bandarnya (abad ke-13 sampai 18

M) seperti Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, Banten, Ternate, Tidore, Goa-Tallo, Kutai, Banjar, dan lainnya yang terletak di pesisir. Daerah pedalaman kepulauan Indonesia seperti Mataram, Wajo, Sopeng, Bone, dan daerah lain juga mengalami perkembangan yang sama.<sup>22</sup>

Berita Tionghoa dan Arab dari sekitar abad ke-7 atau 8 M juga memberi bukti adanya pelayaran dan jaringan perdagangan di mana pedagang-pedagang Arab dan Persia telah berperan dalam jaringan perdagangan internasional melalui Selat Malaka terus ke Tionghoa. Dampaknya sangat jelas bagi kehadiran dan perkembangan Islam yang kemudian menyebabkan tumbuhnya kota-kota Muslim di Indonesia dan Asia Tenggara. Sejumlah kesultanan, mulai dari Samudra Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Cirebon, Banten, Ternate-Tidore, Gowa –Tallo, Banjar, Kutai, Mataram, dan lainnya dari abad ke-13 sampai abad ke-18, ternyata masih melakukan pelayaran dan perdagangan dan memiliki Bandar yang juga berfungsi sebagai ibukota kesultanan, meski ada juga yang pada abad ke-16 dan 17 M sudah mengalami kehilangan fungsinya.<sup>23</sup>

Banyak kota pelabuhan emporium maupun transit yang berkembang pada masa itu pada hakekatnya berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (*economic growth centre*) daerah setempat dan sekaligus menjadi pusat kekuasaan politik (*political centre*) kerajaan Islam. Kota emporium sesungguhnya berfungsi sebagai pusat integrasi perekonomian antara daerah pantai dan pedalaman, serta antara hulu dan hilir sungai di wilayah masing-masing.<sup>24</sup>

Salah satu bandar perdagangan yang berperan dalam penyebaran Islam awal ialah Barus yang terletak di pantai Barat Sumatra Utara. Bandar Barus telah dikunjungi pedagang dari Cina sejak abad ke-7 dan pada saat-saat tertentu juga dikunjungi pedagang Arab, Persia, dan India. Hasil ekspor penting Barus adalah kapur barus dan menyan yang bermutu tinggi, sehingga para pedagang dari Cina dan India langsung mengangkut komoditas tersebut dari sumbernya. Perihal kehadiran para pedagang Arab dan India di Barus pada abad ke-16 terekam dalam catatan Tome Pires mengenai pelabuhan Barus yang merupakan pelabuhan yang ramai dan makmur. Tome Pires pun menggunakan nama Barus dan Fansur sebagai sinonim.<sup>25</sup>

Pada sekitar awal abad ke-15 Malaka berdiri sebagai pusat perdagangan internasional yang terpenting di Asia Tenggara bersamaan dengan masa keruntuhan kerajaan Majapahit. Karena letaknya yang

strategis di jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Mediterania, Afrika, Asia Barat, Asia Selatan, dan Cina, maka Malaka berkembang pesat menjadi bandar internasional yang pesat dan makmur serta menjadi pusat pertemuan segala bangsa dan kebudayaan. Malaka juga menjadi pusat bermukimnya para saudagar Islam yang ikut berperan dalam penyiaran Islam di Nusantara.<sup>26</sup> Selain itu terdapat para ulama (*mullah*) yang sebagian besar berkebangsaan Arab yang berperan mengajarkan Islam di lingkungan masyarakat bandar-bandar pusat perdagangan yang tersebar di Asia Tenggara. Malaka berperan penting dalam mempercepat Islamisasi di bandar-bandar sepanjang jalur perdagangan ke daerah ibukota Majapahit. Hal ini dikarenakan sebelumnya telah adanya hubungan perdagangan antara Malaka dan Majapahit.<sup>27</sup>

Pendiri Malaka adalah Paramesywara, yang setelah memeluk Islam mengembangkan Malaka dari sebuah perkampungan kecil menjadi sebuah kota bandar internasional yang besar dan kerajaan Islam terkemuka. Malaka merupakan satu-satunya kota Bandar yang tidak memiliki daerah pedalaman subur, tetapi mampu menghidupi penduduknya dengan mengimpor bahan pangan dari luar. Didukung kemampuannya memaksa kapal-kapal yang melewati Selat Malaka untuk berlabuh di pelabuhan Malaka dan diikuti dengan pemberian fasilitas yang baik maka Sultan Malaka berhasil menjadikan Malaka pusat perdagangan dan komunitas saudagar internasional di Asia Tenggara.<sup>28</sup>

Dipandang dari perspektif sejarah ekonomi maritim, kota pelabuhan emporium di pesisir utara Jawa menduduki tempat penting dalam proses integrasi antarzona perekonomian di Nusantara mengingat letaknya yang strategis di jalur lalu lintas maritim kepulauan Nusantara.

Salah satu kota bandar penting di Jawa adalah Gresik. Selain dikenal sebagai bandar perdagangan Gresik juga menjadi pusat pendidikan (semacam pesantren), tempat para santri dari berbagai tempat di wilayah Nusantara bagian timur datang belajar agama Islam. Mereka terutama datang dari Ambon, Maluku, dan kepulauan Nusa Tenggara. Di Gresik inilah, Maulana Malik Ibrahim sebagai wali perintis mengambil wilayah dakwahnya. Setelah Malik Ibrahim wafat, wilayah ini dikuasai oleh Sunan Giri, yaitu seorang pemuka Walisongo di Jawa yang terkenal dan penasihat terkemuka sultan Demak dan Pajang.<sup>29</sup> Sunan Giri juga dikenal sebagai seorang pedagang besar yang menerima harta pusaka dari Nyai Gede Pinatih, ibu angkatnya yang kaya raya tetapi tidak berputra.<sup>30</sup> Sementara itu Sunan Ampel mengambil posisi dakwahnya di Surabaya,

Sunan Bonang sedikit ke utara di Tuban, sedangkan Sunan Drajat di Sedayu.<sup>31</sup>

Kalau kita perhatikan posisi wilayah yang dijadikan basis dakwah kelima wali tersebut kesemuanya mengambil tempat “kota bandar perdagangan” atau pelabuhan. Pengambilan posisi pantai ini adalah ciri Islam sebagai ajaran yang disampaikan oleh para dai yang mempunyai profesi sebagai pedagang.<sup>32</sup>

Pengambilan posisi di pantai ini sekaligus melayani atau berhubungan dengan pedagang rempah-rempah dari Indonesia Timur. Sekaligus juga berhubungan dengan pedagang beras dan palawija lainnya yang datang dari pedalaman wilayah kekuasaan Kediri dan Majapahit.<sup>33</sup>

Di Jawa Timur, para wali lebih terlihat sebagai penyebar Islam yang berdagang. Artinya tidak seperti yang banyak digambarkan oleh sementara “dongeng” yang memberitakan kisah para wali sebagai tokoh yang menjauhi kehidupan masyarakat –seperti berlaku sebagai “bhiksu”, atau lebih banyak beribadah semacam bertapa di gunung daripada aktif di bidang perekonomian. Ternyata dinamika kehidupannya lebih rasional seperti halnya yang dicontohkan oleh Rasulullah saw yang juga pernah berdagang.<sup>34</sup>

Adapun pemilihan kota Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati, tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan jalan perdagangan rempah-rempah sebagai komoditi yang berasal dari Indonesia Timur. Cirebon merupakan pintu perdagangan yang mengarah ke Jawa Tengah dan Indonesia Timur, atau pun ke Indonesia Barat. Oleh karena itu pemilihan Cirebon dengan pertimbangan sosial politik dan ekonomi saat itu mempunyai nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam selanjutnya.<sup>35</sup>

Para wali meskipun masing-masing hidup tidak sezaman, tetapi dalam pemilihan wilayah dakwahnya tidak sembarangan. Penentuan tempat dakwahnya dipertimbangkan pula dengan faktor geostrategi yang sesuai dengan kondisi zamannya.

### **Kaum Mubalig Pedagang**

Salah satu gejala penting dari munculnya kota perdagangan pada

masa kesultanan adalah gejala kelahiran kelas pedagang atau usahawan perdagangan yang menjadi pelaku penting dalam perekonomian masyarakat Nusantara pada abad ke 16 sampai 18. Kelas pedagang ini pertama-tama muncul dari kalangan penguasa dan elite tradisional, yaitu raja atau sultan, bangsawan, syahbandar, tumenggung, orang kaya, datuk besar, dan para saudagar dari kalangan santri terkemuka. Mereka berfungsi sebagai pelaku perdagangan dalam skala besar dan perdagangan jarak jauh yang berbasis pada kota bandar emporium.<sup>36</sup>

Kedudukan para pedagang pribumi di kota-kota pelabuhan cukup terkemuka, mereka merupakan golongan menengah yang mempunyai tempat antara penguasa dan rakyat kebanyakan. Gaya hidup feodal yang masih dipakai penguasa dalam usaha perdagangan telah menempatkan golongan pedagang dalam posisi yang baik, tidak hanya membawa prestise sosial tetapi sering pula pengaruh politik. Kalau dalam masyarakat kasta kedudukan pedagang rendah, di kota pelabuhan tersebut kedudukan pedagang menjadi sangat penting dan terkemuka. Agama Islam yang tidak mengenal perbedaan asal keturunan, bangsa, dan kedudukan sosial memberikan membenaran dan legitimasi kepada kedudukan para pedagang.<sup>37</sup>

Menurut *Babad Demak* dan *Babad Gresik* dapat disimpulkan bahwa sebagian para wali dan mubalig Islam pada masa itu juga melakukan kegiatan perdagangan dan pelayaran sebagai basis kehidupan ekonominya. Selain menjadi mubalig, mereka juga menjadi seorang saudagar atau pedagang karena kedua kegiatan itu, yaitu dakwah keagamaan dan kegiatan ekonomi bagi pemeluk Islam tidak mengenal pemisahan yang bearti. Keduanya dapat dilakukan pada saat yang sama seperti yang ditunjukkan oleh sebagian para wali atau ulama Jawa pada masa itu. Sunan Ampel misalnya, dalam *Babad Gresik* disebut-sebut seringkali melakukan pelayaran ke Malaka dan ke tempat lain, selain untuk berdagang juga untuk berdakwah menyiarkan agama Islam. Ditunjukkan pula dalam *Babad Demak* bahwa Ki Pandan Arang yang kemudian dikenal sebagai Sunan Tembayat, salah seorang mubalig Islam di pedalaman Jawa Tengah, semula terkenal sebagai saudagar kaya sekaligus menjadi seorang pejabat lokal terkemuka (adipati) di Semarang.<sup>38</sup> Maulana Malik Ibrahim tidak mengalami kesulitan untuk mendirikan pesantren, sebab ia memiliki banyak pengikut setia serta kekayaan dari hasil usaha dagangannya. Dilaporkan bahwa sehabian penuh di membawa masyarakatnya ke lahan pertanian, sementara malam harinya dia mengajar mereka pelajaran-pelajaran dasar, khususnya

Alquran dan hadis di lembaganya ini.<sup>39</sup>

Kegiatan ganda yang dilakukan saudagar atau pedagang dan mubalig tersebut merupakan gejala sosio-historis yang terkemuka pada masa kesultanan Demak. Pada masa itu pula sesungguhnya telah tercipta hubungan yang erat antara raja, bangsawan, pedagang dan ulama sebagai akibat terjadinya proses komersialisasi di pesisir utara Jawa. Hubungan antara Sultan Demak dan para wali atau ulama serta pedagang cukup interaktif dan integrative sehingga mencerminkan adanya hubungan komunikatif antara kekuasaan politik (*political power*), kekuasaan keagamaan (*religious power*) dan kekuasaan ekonomi atau kemakmuran (*economic power atau wealth*).<sup>40</sup>

### Perdagangan dan Penyebaran Kebudayaan Islam

Menurut teori Barthold, satu syarat yang sangat penting bagi kemajuan kebudayaan ialah selalu adanya kontak di antara bangsa-bangsa. Oleh karenanya kebudayaan dari suatu bangsa akan dapat masuk dan mempengaruhi kebudayaan bangsa lain, jika bangsa itu menguasai lalu lintas perdagangan. Inilah sebabnya tingkat kebudayaan (kecerdasan) orang-orang Islam (Arab) lebih tinggi daripada orang-orang yang beragama lain (orang-orang Barat), selama mereka menguasai perdagangan. Segera setelah penguasaan ini lenyap, orang-orang Barat mengambil alih kemajuan kebudayaan itu dari orang-orang Islam. Jadi, bukanlah soal ras, atau lainnya, tetapi hubungan perdaganganlah yang menjadi syarat bagi pertumbuhan kebudayaan. Melalui hubungan perdagangan timbul kemungkinan terjadinya pertukaran pendapat atau ide di antara bangsa-bangsa.<sup>41</sup>

Demikian pula penguasaan perdagangan oleh orang-orang Islam memungkinkan terjadinya penyebaran kebudayaan Islam di Nusantara. Penyelenggaraan perkapalan dan perdagangan di kota-kota pelabuhan menimbulkan jalur komunikasi terbuka, sehingga terjadi mobilitas sosial baik horizontal maupun vertikal, serta perubahan gaya hidup dan nilai-nilai. Kota perdagangan sebagai pusat pemasaran barang-barang menarik pedagang dari berbagai kebudayaan. Kota-kota pelabuhan tidak hanya menciptakan kontak sosial tetapi juga menyediakan ruang sosial untuk perubahan dan pembaharuan.<sup>42</sup>

Hubungan interaktif dalam kegiatan ekonomi perdagangan antara sultan, ulama, dan pedagang telah melahirkan kaum saudagar

santri. Golongan sosial baru yang berkehidupan makmur karena berperan penting dalam ekonomi perdagangan ini secara terkemuka lahir di daerah perkotaan pelabuhan emporium di pesisir utara Jawa.

Apabila diperhatikan, kelahiran kota emporium yang bercorak metropolitan tersebut sekaligus diikuti pula dengan munculnya gaya hidup baru yang bersifat kosmopolitan, dinamis dan egaliter. Gaya hidup baru kaum pedagang muslim, terutama dalam cara berpakaian (Muslim), berbahasa (Jawa Pesisir), bergaul (egaliter-kosmopolitan), berperilaku dan bekerja sehari-hari (pedagang) semacam itu pada masa kemudian menjadi salah satu ciri gaya hidup masyarakat<sup>43</sup> pesisiran.

Mengenai gaya pakaian, misalnya dalam *Babad Demak* dan *Babad Tanah Jawi* juga disebut-sebut tentang penggunaan baju kotang, jubah, dan surban di kalangan para wali, ulama, atau mubalig, yang merupakan jenis pakaian yang lazim dipakai di lingkungan masyarakat Islam di Asia Barat. Rupanya gaya pakaian semacam ini pada abad ke-16 – 17 menjadi berkembang dan lazim dipakai oleh para ulama, pemuka agama, dan saudagar muslim di Asia Tenggara serta Nusantara. Hal ini dapat terjadi tidak lain karena jaringan transportasi dan komunikasi pada era perdagangan Islam pada masa itu secara luas sudah terbentuk sehingga pelayaran dan perdagangan maritime selain menjadi wahana pertukaran komoditas perdagangan juga menjadi wahana penyebaran agama dan tradisi kebudayaan, dalam hal ini agama dan kebudayaan Islam.<sup>44</sup>

Pengenalan gaya hidup, gaya berpakaian, kesenian, bahasa (Arab) dan sastra (Asia Barat) yang berbau Islam ikut tersebar ke berbagai wilayah Nusantara melalui jaringan komunikasi dan transportasi maritim. Pengenalan bahasa dan aksara Arab, sistem perguruan (pendidikan) Islam, keilmuan (tasawuf, mistik Islam), arsitektur (masjid), serta sastra dan seni (baca Alquran dan musik) Islam pada hakikatnya memiliki awal perkembangan yang berarti sejak masa kesultanan Nusantara.<sup>45</sup>

Demikian pula tradisi belajar ilmu keagamaan di bawah bimbingan seorang ulama yang berpusat di masjid atau surau menjadi model pendidikan di kalangan masyarakat Islam pada masa itu. Pada masa kemudian cara belajar-mengajar mengenai ilmu keagamaan semacam itu menjadi model pendidikan pesantren yang hingga kini masih banyak dijumpai di Indonesia. Dalam hubungan ini istana kesultanan dan pesantren juga menjadi pusat jaringan intelektual (*intellectual networks*) yang terpenting di Nusantara sebagaimana ditunjukkan dengan adanya hubungan kultural antara pusat kraton dan

pesantren; kemunculan para ulama, kyai, mubalig, para wali, dan intelektual Islam di pesantren-pesantren atau perguruan keagamaan pada abad ke-16 – 17; serta pujangga, seniman, sastrawan, dan pemikir di istana kerajaan Islam seperti kesultanan Malaka, Aceh, Demak, dan Mataram.<sup>46</sup>

## Penutup

Hubungan perdagangan dengan proses Islamisasi di Indonesia sangatlah erat. Hal ini berkaitan dengan penguasaan lalu lintas perdagangan internasional oleh bangsa Arab pada saat itu. Oleh karena dalam konsep Islam setiap Muslim adalah pendakwah agama, maka pedagang-pedagang Islam (Arab) merupakan penyebar Islam yang awal di negeri-negeri yang mereka singgahi. Karena merekalah yang banyak berinteraksi dengan orang-orang di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun demikian terdapat sejumlah faktor yang saling berkaitan satu sama lain yang mempengaruhi seluruh proses konversi dan Islamisasi di Indonesia, sehingga Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini.

---

## Endnotes

<sup>1</sup> Nugroho Notosusanto dkk, *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta : Balai Pustaka, 1993), hlm.188.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.184.

<sup>3</sup> Moehammad Habib Mustopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan* (Yogyakarta : Jendela, 2001), hlm.125.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm.126.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.127.

<sup>8</sup> Al-Habib Alwi bin Thahir al-Haddad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh* (Jakarta : Lentera, 1995), hlm.24.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.25.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> UkaTjandrasasmita, *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi* (Kudus: Menara Kudus, 2000), hlm.28.

<sup>12</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam* ( Jakarta : Kencana, 2004), hlm.12.

- <sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.13.
- <sup>14</sup> Moestopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur*, hlm.128.
- <sup>15</sup> Azra, *Jaringan Ulama*, hlm.6.
- <sup>16</sup> al-Haddad, *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh* hlm.39
- <sup>17</sup> Moestopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur*, hlm.130.
- <sup>18</sup> Tjandrasasmita, *Kota-kota Muslim*, hlm.28.
- <sup>19</sup> *Ibid.*, hlm.30.
- <sup>20</sup> Uka Tjandrasasmita, *Arkeologi Islam Nusantara* (Jakarta : Gramedia, 2009), hlm.38.
- <sup>21</sup> Ahli-ahli sejarah yang telah membicarakan jalur pelayaran dan jaringan perdagangan dari abad ke-7 dan 8 sampai abad ke-16 m, di antaranya adalah O.W. Wolters, J.C. van Leur, Rita Rose Di Meglio, dan Meilink Roelofsz. *Ibid.*, hlm.39.
- <sup>22</sup> *Ibid.*
- <sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.42.
- <sup>24</sup> Djoko Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan" *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm.274.
- <sup>25</sup> Mustopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur*, hlm.130.
- <sup>26</sup> Suryo., "Ekonomi Masa Kesultanan", hlm.275.
- <sup>27</sup> Mustopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur*, hlm.130.
- <sup>28</sup> Suryo "Ekonomi Masa Kesultanan", hlm.275..
- <sup>29</sup> *Ibid.*277.
- <sup>30</sup> Widji Saksono, *Mengislamkan Tanah Jawa Metode atas Metode Dakwah Walisongo* (Bandung : Mizan, 1996), hlm.79.
- <sup>31</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1995), hlm.104.
- <sup>32</sup> *Ibid.*
- <sup>33</sup> *Ibid.* Hlm.105.
- <sup>34</sup> *Ibid.*.
- <sup>35</sup> *Ibid.* hlm.106.
- <sup>36</sup> Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan", hlm.278.
- <sup>37</sup> Sartono Kartodirjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emprium sampai Imperium*, jilid I (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1993,) hlm.262.
- <sup>38</sup> Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan", hlm.282.
- <sup>39</sup> Abdurahman Mas'ud, *Dari Haramain ke Nusantara Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* (Jakarta : Putra Grafika, 2006), hlm.62.
- <sup>40</sup> Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan", hlm.282.
- <sup>41</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Pengantar Sejarah Muslim* (Yogyakarta : Mentari Masa, 1989), hlm.10.
- <sup>42</sup> Kartodirjo. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru*, hlm.20.
- <sup>43</sup> Suryo, "Ekonomi Masa Kesultanan", hlm.283.
- <sup>44</sup> *Ibid.*,
- <sup>45</sup> *Ibid.*
- <sup>46</sup> *Ibid.*

## Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII Akar Pembaruan Islam*. Jakarta: Kencana. 2004.
- al-Haddad, Al-Habib Alwi bin Thahir *.Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh* .Jakarta : Lentera.1995.
- Kartodirjo, Sartonno *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emprium sampai Imperium*.Jilid I . Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 1993.
- Mas'ud, Abdurahman *Dari Haramain ke Nusantara Jejak Intelektual Arsitek Pesantren* .Jakarta : Putra Grafika.2006.
- Mustopo, Moehamad Habib. *Kebudayaan Islam di Jawa Timur Kajian Beberapa Unsur Budaya Masa Peralihan* .Yogyakarta : Jendela. 2001.
- Notosusanto, Nugroho dkk. *Sejarah Nasional Indonesia III* .Jakarta : Balai Pustaka. 1993.
- Saksono, Widji. *Mengislamkan Tanah Jawa Metode atas Metode Dakwah Walisongo* . Bandung : Mizan. 1996.
- Shiddiqi, Nourouzzaman *.Pengantar Sejarah Muslim* .Yogyakarta : Mentari Masa.1989.
- Suryanegara, Ahmad Mansur *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia* .Bandung: Mizan. 1995.
- Suryo, Djoko."Ekonomi Masa Kesultanan" *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*.Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve.,2002

Tjandrasasmita, Uka *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia dari Abad XIII sampai XVIII Masehi*. Kudus: Menara Kudus. 2000.

\_\_\_\_\_ *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta : Gramedia. 2009.

# Kiprah Ulama dalam Politik Pada Masa Pendudukan Jepang Di Indonesia (1942-1945)

Eva Syarifah Wardah

(Dosen Fakultas Tarbiyah dan Adab IAIN SMH Banten)

## Abstrak:

*Sejarah perjuangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan umat Islam, karena keterlibatan umat Islam Indonesia sangat mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah pesantren yang dipimpin oleh kaum ulama, di mana ulama mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pemimpin umat Islam ia memiliki kepribadian yang tinggi dan mulia tidak saja dalam bidang keagamaan, tetapi juga dalam kemasyarakatan. Pada masa penjajahan ketika ulama berhadapan dengan realitas penjajahan, pemikiran keagamaan menuntutnya berperan lebih dari sekedar pemimpin serta pembina pesantren saja. hakekatnya ia adalah pemimpin dari sebuah komunitas spritual Islam yang kokoh.*

*Pada masa pendudukan Jepang terjadi perubahan pada posisi dan peran ulama. Jika pada masa kolonial belanda yang dijadikan elit kekuasaan dalam pemerintahan adalah kelompok priyayi (birokrat), maka pemerintahan Jepang memposisikan ulama sebagai tangan-tangannya. Fakta sejarah menjelaskan bagaimana perbitungan Jepang terhadap kepemimpinan informal Kyai (ulama) ditujukan pada pemilihan K.H. Hasyim Asy'ari sebagai pejabat Shumubu (KUA), posisi ulama dalam Peta, partisipasi dalam Cou Sang in (Dewan Penasehat), pendirian Masyumi, dibentuknya Hizbullah dsb. Dengan kata lain Jepang tidak mengabaikan posisi ulama kendati harus dipahami dengan ekspansi Dai Nipon*

**Kata Kunci:** *Ulama, Politik, Pendudukan Jepang*

## Pendahuluan

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan tidak terlepas dari sejarah perjuangan umat Islam, karena keterlibatan umat Islam Indonesia sangat mewarnai gerak langkah perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Salah satu basis kekuatan politik Islam di Indonesia adalah pesantren yang dipimpin oleh kaum ulama, di mana ulama mendapat kedudukan terhormat dalam masyarakat. Sebagai pemimpin umat Islam, ia memiliki integritas kepribadian yang inggi dan mulia tida saaja di bidang keagamaan, tetapi juga dalam bidang kemasyarakatan. Karena itu kaitan ulama dengan perubahan sosial harus dilihat pada perubahan kepemimpinan ulama, perubahan ulama tentang masalah sosial dan keagamaan yang dialami umat.<sup>1</sup>

Pada masa pergerakan nasional, ketika ulama berhadapan dengan realitas penjajahan, pemikiran keagamaan menuntutnya berperan lebih sekedar guru mengaji. Hakekatnya ia adalah pemimpin dari sebuah komunitas spritual Islam yang kokoh, tampilnya rezim kekuasaan penjajah dengan sendirinya mengancam keutuhan itu.

Sebagaimana dikemukakan Kahin, seorang ahli terkemuka tentang awal nasionalisme dan revolusi Indonesia<sup>2</sup> bahwa Islam tidak hanya ikatan berama, melainkan sesungguhnya semacam lambang dari golongan penentang penjajah. Hal ini dibuktikan oleh fakta sejarah mengenai penentangan dan perlawanan secara besar-besaran yang digerakan oleh para santri dan ulama dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia selama hampir empat abad jaman penjajahan.

Pada masa akhir pemerintah Hindia Belanda kesemarakan pergerakan nasional mulai surut bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia serta tindakan keras dari pemerintah Belanda dan berakibat sangat buruk bagi bangsa Indonesia, baik dalam segi sosial, ekonomi, maupun dalam kehidupan politik. Maka dari itu perjuangan melawan kolonialisme dan imperoalisme tidak lagi dilakukan secara mutlak bersikap non-kooperasi, melainkan mengambil sikap kooperasi dengan pemerintah kolonial dengan tuntutan Indonesia berparlemen. Aktivitas parlementerlah satu-satunya jalan yang ditempuh

---

<sup>1</sup> Hiroko Horikoshi, *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987), hal 2.

<sup>2</sup> George MC Turman Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, (Malayasia: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1952), hal 38.

untuk menghadapi pemerintah yang sudah berada diambang kehancuran, lebih-lebih setelah negeri Belanda diduduki Jerman pada bulan mei 1940.

Kehadiran Jepang di Indonesia telah berhasil menduduki tempat-tempat terpenting yang semula dikuasai Belanda. Penyerahan Hindia Belanda tanpa syarat kepada Jepang 8 maret 1942, maka berakhirilah kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Sejak itu pula kekuasaan Jepang secara resmi di Indonesia, sekarang Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang.

Sebagian rakyat Indonesia, khususnya di pulau Jawa menyambut baik atas kehadiran Jepang. Apalagi Jepang menggunakan pendekatan manusiawi lewat propaganda yang mampu menembus kebencian terhadap kolonialisme pada umumnya. Pidato penguasa Jepang mengena dalam hati sanubari bangsa Indonesia bahwa Jepang merasa bertanggung jawab untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, Indonesia akan dimasukkan dalam kesemakmuran bersama Asia Timur Raya dibawah Jepang.<sup>3</sup> Di samping itu, kebencian rakyat Indonesia terhadap kolonial Belanda semakin memperlemah kedudukan Hindia Belanda di Indonesia.

Pendekatan Jepang terhadap umat Islam terealisasi dalam kebijakan politiknya yang memberi ruang gerak lebih leluasa untuk umat Islam untuk turut serta secara langsung dalam politik dan latihan militer.<sup>4</sup> Jepang mendorong dan memberi prioritas dengan mendirikan organisasi sendiri, sedangkan organisasi kalangan nasionalis yang netral agama tidak digalakan. Seperti halnya pada tanggal 10 September 1943 pemerintah Jepang menghidupkan kembali organisasi Muhammadiyah dan NU, disusul berdiri Perserikatan Umat Islam (PUI) di Majalengka dan Sukabumi. Sedangkan organisasi Taman Siswa yang berorientasi dalam pendidikan dibatasi ruang geraknya.<sup>5</sup> Hal ini tidaklah berarti selalu mengikuti kepada Jepang, banyak hal-hal yang diperaktekan Jepang berlawanan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Hal ini menjadikan sebagian tokoh Islam menarik diri kerjasama dengan Jepang, sehingga muncul pemberontakan yang dipimpin oleh ulama, seperti yang terjadi di

---

<sup>3</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal 120.

<sup>4</sup> A.Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hal 21.

<sup>5</sup> Deliar Noer, *Partai Islam Dipentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1987), hal 23.

Singaparna (Tasikmalaya) dipimpin oleh Kyai Zaenal Mustofa, kemudian disusul Indramayu, Aceh, dan Blitar.<sup>6</sup>

Masa menjelang kemerdekaan Indonesia, pihak pemuda Islam juga tidak mau ketinggalan. Mereka juga merasa memiliki kewajiban ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dalam rapat pemuda Islam di Jakarta 21 Oktober 1944 diambil keputusan untuk menyusun mosi yang diajukan kepada Jepang. Di samping itu akhir pebruari 1945 diadakan latihan Hizbullah sebanyak 500 orang salah satu organisasi semi militer yang dibentuk Jepang sebagai cadangan tentara Peta. Sejak berdirinya *Hizbullah* ditunjukkan dalam ragka partisipasi umat Islam dalam membantu perang Asia Timur raya Jepang yang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Akan tetapi pada akhirnya tentara *Hizbullah* sangat aktif dalam usaha perebutan senjata dari Jepang sebagai modal perjuangan bangsa Indonesia. Dengan demikian barisan tentara *Hizbullah* merupakan suatu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia. Bersama para pejuang lainnya, baik yang tergabung dalam Peta maupun badan kelasykaran turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan para ulama dan Kyai sebagai pembimbing dan pemimpin mereka.

### **Politik Jepang Terhadap Umat Islam Indonesia**

Masa pendudukan Jepang kendatipun singkat dapat dicatat sebagai periode pembuka kembali ketertiban Islam dalam dunia politik. Sumbangan terbesar Jepang bagi politik Indonesia terletak pada upaya untuk menyatukan berbagai kekuatan Islam dalam sebuah organisasi Islam Majelis Syuro Indonesia (Masyumi) serta memberi ruang gerak kepada pemimpin-pemimpin Islam untuk turut serta dalam pemerintahan.

Perubahan pandangan pemerintah pendudukan Jepang terhadap elit nasionalis pada awal tahun 1940-an mempunyai dampak membaiknya kedudukan kalangan Islam. Propaganda nasionalisme Indonesia yang semula mendapat dukungan pemerintah menderita pasang surut sampai ada janji Nippon untuk kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu posisi Jepang pada perang pasifik semakin defensif, maka tidak diragukan lagi

---

<sup>6</sup> AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid I* (Bandung: Angkasa, 1977), hal 112

perlunya mempersiapkan tenaga besar-besaran dalam menghadapi perang. Dan itu tidak lain bagi Jepang harus memperoleh dukungan sebesar mungkin dari rakyat, dimana kaum nasionalis pada saat itu belumlah mendapat dukungan di tingkat rakyat pedesaan bahkan jauh jika dibandingkan dengan Islam.

Dalam menghadapi umat Islam, pemerintah Jepang sebenarnya mempunyai kebijakan politik sama dengan Belanda, hanya dalam awal pendekatannya Jepang memperlihatkan sikap bersahabat. Karena Jepang berkeyakinan umat Islam merupakan kekuatan yang paling besar dalam menghadapi sekutu. Latar belakang sejarah Umat Islam Indonesia yang anti Imperialisme Barat dipandang memiliki kesamaan tujuan dengan Perang Asia Timur Raya Jepang. Sikap umat Islam yang demikian itu akan dimanfaatkan oleh Jepang.

Sebagaimana diketahui bahwa umat Islam sangat menolak (anti) Kolonialisme baik yang dikembangkan oleh Belanda sebelumnya maupun dilancarkan oleh Jepang. Oleh karena itu untuk mencegah timbulnya gerakan politik anti kolonial yang melarang segala bentuk pertemuan, pergerakan, anjuran atau propoganda mengenai peraturan dan susunan negara serta melarang semua rapat dan berbagai kegiatan politik. Bahkan pada tanggal 20 maret 1942 dikeluarkan pula peraturan untuk membubarkan semua perkumpulan terkecuali yang sipatnya hiburan (pelesiran, senang-senang, olah raga, kesenian, drama dan sebagainya yang tidak bermuatan politik) dengan syarat para pemimpinnya harus mohon ijin dan bersumpah tidak akan menjalankan aksi-aksi politik.<sup>7</sup>

Dalam upaya membangun dan mempertahankan kekuasaannya serta keberadaan di dunia internasional, jepang mengalihkan perhatiannya pada kalangan Islam, persamaan idiologi menentang kekuasaan Barat akan dimanfaatkan jepang untuk mencoba mengadakan kerja sama dalam menentang Barat (Belanda). Lebih penting lagi bagi Jepang bahwa Jepang akan memanfaatkan potensi umat Islam yang sangat banyak serta mempunyai kemampuan mobilisasi yang tinggi.

Berbeda dengan politik netral yang dikembangkan penguasa sebelumnya (Belanda), penguasa Jepang berusaha membujuk para pemimpin umat Islam untuk bersedia bekerja sama dengan pemerintah militer Jepang. Mereka menyebut dirinya sebagai "saudara tua" rakyat

---

<sup>7</sup> CST Kansil dan Julianto, *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1982), hal 41.

Indonesia. Ditempuhnya politik semacam ini terutama bertujuan untuk memobilisasikan seluruh penduduk dalam rangka mendukung tujuan-tujuan perang yang cepat dan mendesak. Maka dalam konteks sosio-politik dan militer seperti inilah mengapa Jepang membiarkan organisasi Islam MIAI tetep hidup, karena umat amat dibutuhkannya suatu kebijaksanaan yang sangat dipahami, karena umat Islam telah teramat benci dan lelah berada dalam kekuasaan kolonial Belanda.<sup>8</sup>

Akan tetapi pemerintah Jepang tidak menghendaki parpol Islam, mereka lebih menyukai hubungan langsung dengan ulama daripada dengan pemimpin parpol. Oleh karena itu Jepang segera mengeluarkan maklumat untuk secepatnya pembuburan parpol.<sup>9</sup>

Tindakan Jepang tersebut jelas tidak menghendaki rasa takutnya terhadap Islam sebagai partai politik. Akan tetapi di satu pihak Jepang menyadari akan potensi umat Islam dalam menunjang tujuan perang Jepang. Sekalipun Jepang tidak menyetujui dan menyukai berhubungan dengan pemimpin parpol Islam, namun Jepang memerlukan ulama untuk membentuk wadah organisasi baru guna membina para ulama dan umat Islam. Untuk tujuan tersebut Jepang segera membentuk Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) sebagai pengganti kantor *Voor Het Inlansvbe Zaken* masa Belanda. Kemudian *Shumubu* tersebut dikembangkan dan dibentuk cabang-cabangnya disetiap daerah, propinsi, dan kabupaten. Melalui cara inilah diharapkan para tokoh agama mau menduduki jabatan pada tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Orang yang pertama menduduki jabatan pada tingkat pusat adalah Husen Djayadiningrat. Beliau ditempatkan pada pucuk pemerintahan sedangkan K.H Wahid Hasyim dan K.H Mas Mansur dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan komtrak langsung dengan para pemimpin Islam dan masyarakat yang ada didaerah. Hal ini dapat dilihat ketika *shumubu* melaksanakan tugas dalam rangka menjalankan program pemerintah jepang., yaitu ketika tanggal 7 desember 1945 tiga puluh dua orang ulama dariseluruh jawa diberi penghormatan dalam sebuah resepsi oleh panglima tertinggi di istana gubernur di Batavia, suatu usaha yang sudah diperhitungkan secara cerdas untuk memberikan kesan kepada para pemimpin agama ini tentang martabatnya serta tentang pengakuannya para pengusaha militer

---

<sup>8</sup> A.Syafii Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988), hal 20.

<sup>9</sup> Harry J Benda, *Blan Sabit dan Matabari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal 142.

terhadap kedudukannya yang penting. Pertemuan tersebut tidak pernah terjadi dan tidak pernah terpikirkan di masa pemerintahan Belanda, diatur oleh *shumubu*, tanpa MIAI diambil sebagai perantara.<sup>10</sup>

Untuk menarik kembali simpati umat Islam selain mengadakan propaganda yang gencar, Jepang membentuk persiapan umat Islam yang merupakan ranting dari gerakan 3 A. persiapan umat Islam ini diketuai oleh Abikusno Tjokrosuyoso, salah seorang elit Islam dari golongan PSII. Tujuan Jepang mengadakan organisasi ini untuk menggantikan posisi MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) atau majelis Islam luhur yang dianggap pemerintah militer anti kolonialisme. Karena itu, maka Jepang menganggap pula MIAI anti Jepang. Tetapi upaya ini mengalami ketidakberhasilan, karena Abikusno merasa kesulitan untuk mempersatukan umat Islam Jawa. Ketika diadakan pertemuan antar tokoh agama di Jakarta, yang dihadiri oleh beberapa utusan dari seluruh Jawa, mayoritas mereka tetap menginginkan ka beradaan MIAI.

Melihat kenyataan yang ada, akhirnya pemerintah Jepang mengambil alternatif kebijaksanaan lain, yaitu membolehkan MIAI dalam beraktifitas asal dalam kegiatannya tidak bermuatan politik, serta mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah Jepang. Kendatipun demikian, keberadaan kembali MIAI kurang dapat perhatian dari dua organisasi penyokong utama yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini disebabkan karena terjadi perselisihan paham dalam kongres, maka dari itu akhirnya MIAI mengalami kemerosotan dan pada akhirnya bubar.

Karena keadaan perang Jepang semakin memburuk dan semakin terpuruk, sementara organisasi bentukan Jepang yang diharapkan bisa membentuk belum juga tampak, maka pada akhirnya Jepang mengambil inisiatip untuk mengambil sebuah wadah yang dilengkapi dengan latihan militer dengan tujuan untuk menciptakan pasukan sukarelawan. Pasukan itu diberi nama PETA (*Pembela Tanah Air*) Organisasi tersebut akhirnya di bentuk pada tanggal 3 November 1943.

Untuk mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat Indonesia pada umumnya lebih khusus umat Islam. Jepang memperlalat pemimpin Islam. Mereka ditugasi untuk memobilisasi masa agar membantu Jepang tidak hanya digaris belakang tetapi di front depan dalam medan perang. Ternyata program Jepang yang satu ini cukup

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 150

berhasil berbondong-bondonglah umat Islam mendaftarkan diri. Hampir seluruh Jawa dipenuhi oleh sukarelawan. Seperti yang sudah disinyalir Benda, bahwa korps perwira Indonesia yang berlatih mulai akhir bulan Oktober 1943, meliputi jumlah kiai yang sangat besar.

Untuk mengimbangi kekuatan kaum nasionalis yang pada saat itu, mendirikan Berisan pelopor dengan keanggotaan berasal dari *Jawa Hokokai-Jepang* memberikan izin kepada kaum muslimin Jawa untuk mendirikan *Hiszbollah* pada tahun 1944.

Selanjutnya amat menarik unruk melihat perkembangan selama pendudukan Jepang kesimpulan yang dianjurkan Benda bahwa untuk beberapa waktu dalam kenyataan Jepang lebih suka memberi berbagai konsensi-konsensi kepada tuntutan umat Islam daripada kaum nasionalis, apalagi priyayi, hanyalah pada akhir masa pendudukan konsnesi-konsensi kepada elit Islam diimbangi dan akhirnya menjadi tidak penting lagi dengan adanya dukungan yang semakin meningkat dan menentukan kepada kaum nasionalis. Meskipun demikian Islam merupakan kekuatan tersendiri dalam percaturan politik di Indonesia karena sejarah keberadaannya yang panjang selama berabad lamanya dan besarnya penganut agama ini. Menghadapi situasi yang menegangkan menjelang kemerdekaan Indonesia berbagai kelompok Islam, terlihat cukup eksis dalam kancah pergumulan untuk memperjuangkan cita-cita politik mereka. Walaupun secara formal tujuan organisasi mereka menekankan pada kegiatan keagamaan dan sosial. Kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat karena memang dijanjikan oleh pemerintah Jepang, melibatkan semua kekuatan yang ada untuk mencari penyelesaian dasar-dasar negara yang akan ditegakan di bumi nusantara ini.

### **Reaksi Ulama Terhadap Kebijakan Politik Pemerintah Pendudukan Jepang**

Serentetan kemenangan Jepang yang cepat di ASIA Tenggara berpuncak dengan kemenangan dahsyat telah memberikan kesan mendalam bagi pemimpin-pemimpin Indonesia. Pada mulanya kedatangan bala tentara Jepang disambut dengan gembira oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi kegembiraan itu pun segera berubah menjadi kebencian setelah diketahui bahwa Jepang tidak lebih baik dari Belanda, bahkan mereka lebih kejam dan tidak segan-segan menghukun rakyat Indonesia yang dianggap menentang.

Semula para pemimpin organisasi Islam pun menyambut dengan ramah, mereka berharap kedatangan Jepang akan bisa memberi kelonggaran dalam mengurus soal-soal keislaman terutama soal dakwah Islam. Namun harapan itu juga segera lenyap, sebab seminggu setelah menguasai Indonesia kolonel Horie berpidato dan menyatakan bahwa dirinya telah diangkat oleh pemerintah Jepang menjadi Kepala Kantor Urusan Agama (*shumubu*). Kolonel Horie juga menjelaskan bahwa ia akan segera menjelaskan tugasnya mengurus tempat-tempat ibadah, mempelajari masalah-masalah Islam baik dari segi hukum, budaya maupun aktifitas keagamaan lainnya. Selain itu dikatakan juga bahwa *shumubu* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Jepang. Oleh karena itu *shumubu* harus setia dan menuruti kemauan pemerintah Jepang yang sedang berkuasa.<sup>11</sup>

Pada masa awal pendudukannya di Indonesia khususnya di pulau Jawa, propaganda Jepang untuk membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan bangsa Barat (Belanda) terus menerus dilancarkan guna mendapat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia. Tampaknya Jepang mengetahui potensi rakyat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam dan mempunyai tradisi memusuhi Barat. Maka dari itu tidak segan-segan Jepang merekrut ulama dan para santrinya diseluruh Jawa guna memanfaatkan semangat yang ada pada setiap umat Islam Indonesia yang anti terhadap Barat. Di mana selama tahun-tahun terakhir kekuasaan Belanda, kondisi sosial politik akibat tekanan pihak pemerintah kolonial semakin keras dirasakan, inilah salah satu sebab para pemimpin Islam menunjukkan sikap simpati terhadap kedatangan pasukan Jepang.

Pemerintah Jepang melihat perkembangan Islam Indonesia terdiri dari dua bagian. Pertama kegiatan politik yang menguasai kehidupan umat Islam yang berada di kota, sedangkan sebagian besar para ulama yang tinggal di desa. Kalangan ulama terakhir inilah digambarkan sebagai ulama yang jauh dari analisis politik. Oleh karena itu Jepang akan dapat memanfaatkan potensi ulama desa ini asal mereka dijauhkan dari konsepsi politik dan parpol Islam. Dengan kata lain pemerintah Jepang akan sangat merasa aman dengan membina hubungan militernya dengan ulama yang tidak turut campur dalam urusan politik. Mayor Jendral Okazaki lebih menekankan perhatiannya kepada ulama

---

<sup>11</sup> Choirul Anam, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU*, (Solo: Jatayu, 1985), hal 113.

dari pada Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Maka untuk berhubungan langsung dengan ulama tersebut digunakan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama) sebagai penggerakannya.<sup>12</sup>

Upaya pemerintah Jepang dalam mempolitisir rakyat Islam di pedesaan, pada tanggal 1 Juli 1943 kursus latihan pertama untuk kiai dan ulama dalam satu upacara yang mengesankan oleh Kolonel Kawasaki yang mewakili *Gunseikan*, Kolonel Horie kepala *Shumubu* dan pemimpin latihan tersebut mengumumkan kepada para kiai bahwa tujuan latihan itu adalah :

*“Memperkuat pengertian saudara-saudara tentang situasi dunia dan untuk meningkatkan semangat saudara-saudara sehingga saudara mampu memberikan dukungan yang sebesar-besarnya bagi pemerintah”*.<sup>13</sup>

Sebenarnya pendekatan Jepang terhadap Islam tidak hanya berlangsung pada saat pendudukan, namun jauh pada masa sebelumnya. Tentu hal ini berdasarkan penelitian Jepang setelah mereka melihat sikap politik umat Islam yang tidak pernah damai dengan penjajah (Barat). Adapun setelah pendudukan, praktek pendekatan terhadap ulama sangat mengejutkan tidak hanya bagi kalangan nasionalis sekular, tetapi juga kalangan umat Islam sendiri. Tidak lama setelah pendaratan, Angkatan Darat Jepang yang menguasai pulau Jawa, Madura dan Sumatra yang berpusat di Jakarta segera mengeluarkan larangan kegiatan ormas dan parpol. Larangan ini yang terkena adalah Islam. Karena kenyataan dari parpol masih ada adalah partai Serekat Islam Indonesia (PII) sedangkan dari kalangan nasionalis Parinda. Demikian juga terhadap ormas Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Perserikatan Ulama di kenai pembubaran.

Sekalipun demikian diikuti dengan pembentukan persatuan umat Islam yang di pimpin Abikusno Tjokrosujoso merupakan bagian dari gerakan Tiga A, namun umat Islam tidak menaruh simpati terhadap tindakan Jepang. Termasuk K.H Hasyim Asy'ari dari NU menentang pembekuan kegiatan ormas dan parpol Islam tersebut. Oleh karena itu sejak tahun pertama pendudukan Jepang di Jawa, umat Islam sudah

---

<sup>12</sup> Ahmad Mansyur Suryanegara, *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hal 275.

<sup>13</sup> Harry J Benda, *Blan Sabit dan Matahari Terbit; Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal 168.

permusuhan. Sikap ini tidak hanya di perlihatkan oleh para pemimpin organisasi Islam tetapi juga oleh para ulama secara individual yang bergerak secara sendiri-sendiri. Para pemimpin organisasi Islam masih dapat menyatakan bekerjasama dengan Jepang asalkan mereka tidak menghina Islam. Sedangkan dari para ulama individual melahirkan penolakan yang bersifat progresip dan mengarah kepada pemberontakan-pemberontakan.

Semula Jepang berharap bahwa ulama dan umat Islam akan bekerjasama dengan Jepang. Akan tetapi tidaklah semua ulama bersedia bekerjasama dengan pemerintah Jepang, sebab bukan saja Jepang lebih kejam seperti yang tercermin pada sistem *romusha* yang mereka bangun, merampas padi rakyat dengan dalih untuk kepentingan perang serta tindakan *Kem pel tai* (Polisi Militer) yang menganut pukul dahulu urusan belakang. Lebih dari itu yang dikawatirkan oleh para ulama adalah Jepang hendak mengintroduksikan *Shintoisme* dikalangan umat Islam. Perintah berseikeiri yaitu membungkukkan badan kearah Matahari Terbit (Jepang) serta pendewaan terhadap *Tenno Heika* (Kaisar Jepang) adalah satu isu yang hangat dibicarakan dikalangan ulama. Mereka (Ulama) mengetahui bahwa dibalik mulut manis Jepang terselip tujuan yang sebenarnya yakni mengeksploitasi kekuatan Islam untuk kepentingan Jepang.

Pada pertemuan lima puluh sembilan kiai dan ulama dari seluruh Jawa yang diselenggarakan di Bandung pada permulaan tahun 1943. Abdul Karim Amrullah sebagai penasehat *Shumubu* menunjukkan sikap menentang. Sekalipun merupakan hal yang sepele, tetapi menimbulkan katagangan hubungan antar pihak Jepang dan ulama, Abdul Karim Amrullah tidak mau *seikeiri* ruku menghadap kearah Tokyo karena dipandang merubah arah kiblat dari tanah suci ke Jepang.

Suasana memang sangat mendukung untuk berontak, kesengsaraan serta penderitaan rakyat akibat penindasan serta kejaman Jepang sudah melampoi batas perikemanusiaan. Maka inilah sebabnya mengapa timbul pemberontakan-pemberontakan lokal yang lahir atas inisiatif pemuka-pemuka agama seperti yang terjadi di Singaparna (Tasikmalaya), Aceh, Indramayu, dan Blitar.

Di Singaparna (Tasikmalaya) pada tanggal 25 Pebruari 1944 terjadi suatu pemberontakan yang dipimpin Kyai Haji Zainal Mustafa, seorang ulama yang tegas pendiriannya serta memiliki dasar keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Beliau tidak bersedia melakukan *seikeiri* yakni memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan

memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan membungkukkan badan kearah Tokyo. Karena sikapnya tersebut maka hubungan antar Kyai Haji Zainal Mustafa dengan pemerintah Jepang semakin renggang. Beliau telah bertekat melawan Jepang karena sudah tidak tahan melihat kehidupan rakyat yang semakin sengsara. Untuk menghindari segala kemungkinan beliau mempersiapkan murid-muridnya dengan mempertebal keyakinan para santrinya bahkan mengajarkan kemahiran dalam membela diri untuk mempertahankan serangan dari musuh. Melihat itu pemerintahan Jepang merasa khawatir dan sebagai antisipasinya segera mengambil tindakan guna melumpuhkan kekuatan kelompok Kyai Haji Zainal Mustafa tersebut.<sup>14</sup>

*Kempeitei* sebagai organisasi rahasia Jepang setelah mendengar adanya gerakan protes tersebut mencoba melunakan dengan mengirimkan surat panggilan kepada Kyai Haji Zainal Mustafa tetapi panggilan ditolak oleh Kyai Haji Zainal Mustafa. Maka disinilah nampaknya gerakan itu mulai menghadapi detik yang dinantikan. Satu pasukan polisi *Keibodan* dan tentara Jepang datang ke Sukamanah untuk menangkap Kyai Haji Zainal Mustafa. Peristiwa itu terjadi setelah shalat jum'at, banyak dari tentara Jepang yang luka-luka karena persenjataan yang tidak seimbang, maka gerakan protes tersebut dapat dipadamkan dan beliau dihukum mati setelah sebelumnya mendapat siksaan berat dan dikuburka di Ancol. Akan tetapi makam beliau kemudian dipindahkan ke daerah asalnya dan diistirahatkan ditengah-tengah masyarakat yang dibelanya dengan taruhan nyawa.

Meskipun pemberontakan Kyai Haji Zainal Mustafa secara fisik memang sudah diredakan oleh tentara Jepang, namun semangat perlawanan umat Islam belumlah padam bahkan semakin menggelora. Tiga bulan kemudian pada bulan Mei 1944, seorang haji di Karangampel Indramayu bangkit memimpin pemberontakan itu kemudian dapat dilumpuhkan tentara Jepang.

Pada bulan Agustus tahun yang sama pecah lagi pemberontakan di daerah Lohbener serta Sindang Indramayu yang dipimpin oleh Haji Madrias, H. Kartiwa, Kyai Serengseng, Kyai Kusen dan Kyai Mukasan. Munculnya pemberontakan di Indramayu ini disebabkan oleh tekanan Jepang terhadap kewajiban petani untuk menyerahkan pajaknya yang

---

<sup>14</sup> AH. Nasution, *Sekitar Perang Kemerekaan Indonesia Jilid I* (Bandung: Angkasa, 1977), hal 112

rakyat karena terlalu memberatkan.<sup>15</sup>

Di Aceh, setelah Jepang menduduki daerah tersebut, muncul pemberontakan yang dipimpin Kyai Muda Tengku Abdul Jalil, seorang pemimpin dayah di Aceh pada tanggal 10 November 1942.

Selanjutnya pada bulan Pebruari 1945 pecahlah pemberontakan dari organisasi yang diciptakan Jepang sendiri. Pemberontakan itu datang dari barisan Pembela Tanah Air (PETA) yang berdiri bulan Oktober 1943. Anggota PETA di Blitar merasa tersentuh hatinya setelah sering kali mendengar dan melihat hal-hal yang menyakitkan hati bangsa Indonesia, tidak tahan melihat kesombongan dan kesewenangan Jepang. Bagi para patriot PETA di Blitar yang di pimpin Supriyadi dan dibantu Muradi merasa sudah muak melihatnya. Untuk itu kedua pemimpin tersebut secara terbuka menyampaikan rencana untuk melancarkan pemberontakan terhadap Jepang.

Dalam usaha mengakhiri pemberontakan, pihak Jepang menggunakan cara klasik dari negara-negara kolonial. Mereka menggunakan pasukan-pasukan pribumi untuk menghadapi bangsa sendiri. Sehingga pada akhirnya pemberontakan dapat dihentikan dan seluruh yang terlibat dapat diamankan. Dari semua yang terlibat berjumlah 55 orang. Mereka mendapat vonis yang beragam, hukuman tersebut ada yang hanya terkena pidana selama 2 tahun, tetapi ada pula yang mendapat hukuman mati. Sedangkan pemimpin utam dari pemberontakan ini (Supriyadi) tidak diketahui nasibnya, namun kebanyakan orang menduga beliau mati saat menerima siksaan pada introgasi.

Ternyata kepeloporan Kyai Haji Zainal Mustafa dalam memimpin gerakan protes pesantren Sukamanah tersebut telah mengilhami serta membangkitkan para ulama lainnya untuk melancarkan perlawanan bersenjata dan menyalakan keberanian tentara PETA bersama ulama Blitar untuk melancarkan pemberontakan terhadap Jepang. Dari gerakan protes pesantren Sukamanah yang diikuti oleh Lohbener, Indramayu, Aceh, Blitar dan Kaplongan Cirebon memaksa pemerintah Jepang untuk mengumumkan janji Kemerdekaan Indonesia serta memaksa Perdana Menteri Kaiso pada sidang istimewa *Taikoku Gikai* ke-85 pada tanggal 7 September 1944 menjawab untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak dikemudian hari.

---

<sup>15</sup> Ibid, hal 126.

memberikan kemerdekaan kepada Indonesia kelak dikemudian hari.

Selain perlawanan dari ulama individu yang bergerak secara sendiri-sendiri dipedesaan, perlawanan kaum muslimin yang duduk pada pucuk pemimpin juga mengadakan perlawanan secara moderat. K.H Mansur, secara tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa umat Islam hanya dapat bekerja sama dengan Jepang asalkan pemerintah Jepang tidak menghina Islam. Dan jika Islam terhina, umat Islam akan bangkit membelanya. Kemudian K.H Hasyim Asy'ari, seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) mengingatkan bahwa umat Islam jangan sampai terlalu percaya kepada pemimpin kafir termasuk Jepang.

Dua nama pemilik Islam yang kharismatik tadi pada mulanya dijadikan Jepang sebagai alat propaganda andalan Jepang, akan tetapi pada akhirnya dengan cara diplomasi berhasil memalingkan tujuan Jepang yang sebenarnya. Demikian reaksi ulama terhadap kebijakan politik Islam Jepang, baik ulama tradisional maupun ulama modern dalam kancah politik Jepang, mereka sangat menentukan nasib umat Islam dikemudian hari.

## Penutup

Peran ulama dalam melawan penjajah sangat besar, hal ini dapat dilihat dari reaksi terhadap peristiwa yang menggemparkan pada tahun-tahun terakhir pemerintah Hindia Belanda tentang rencana pembuatan Undang-undang Perkawinan yang dipandang sebagai campur tangan pemerintah kolonial terhadap agama Islam. Oleh karena itu muncul protes-protes umat Islam, di mana pemimpin-pemimpin Islam bersepakat untuk bersatu, akhirnya sampai pada titik dimana ulama-ulama bersama-sama mendukung dibentuknya Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI).

Pada masa pendudukan Jepang, ulama diikutsertakan dalam kepemimpinan dan pemerintahan, akan tetapi tidak semua ulama bersedia bekerja sama dengan Jepang, sebab bukan saja Jepang lebih kejam dari Belanda. Lebih dari itu yang dikhawatirkan oleh ulama adalah Jepang hendak mengintroduksikan *shintohisme* di kalangan umat Islam, sehingga muncul pemberontakan-pemberontakan yang lahir atas inisiatif pemuka-pemuka agama seperti yang terjadi di Singaperna (Tasikmalaya), Indramayu, Aceh, dan Blitar.

## Daftar Pustaka

- Anam, Choirul. 1985. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan NU*. Solo, Jatayu
- Benda, Harry J. 1985. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit ; Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta, Pustaka Jaya.
- Harikoshi, Hiroko. 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*. Jakarta P3M.
- Kansil, CST dan Julianto. 1982. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Ma'arif, A. Syafii. 1988. *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press.
- Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam Dipentas Nasional*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Nasotion, AH. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia ; Jilid 1 Proklamasi*. Bandung, Angkasa.
- Notosusanto, Nugroho dan Marwati Djonet Poesponegoro. 1992. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Pringgogidgo, AK. 1991. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta, Dian Rakyat.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional; dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. 1995. *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam dalam Kurun Modern*. Jakarta, LP3ES.
- Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta, LP3ES
- Rahardjo, M. Dawam. 1985. *Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari bawah*. Jakarta, P3M.
- Zuhri, Saifuddin. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangan di Indonesia* Bandung, Al Ma'arif